

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



# RENCANA AKSI ATAS KINERJA

TAHUN  
**2021**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 32,5 Banjarbaru 70711  
Telepon (0511) 4781116 Faksimile (0511) 4774501  
Surel: kalsel@bpkp.go.id Situs: www.bpkp.go.id

---

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor: S-625/PW16/6/2021 tanggal 19 April 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2021. Rencana Aksi atas Kinerja tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja mengenai target kinerja yang akan dicapai (*ends*) dan program/kegiatan (*means*) yang akan dilakukan dengan target waktu pelaksanaan yang jelas dan anggaran yang disediakan untuk mencapai target kinerja tersebut.

Rencana Aksi atas Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja.

Rencana aksi atas kinerja memperhatikan kondisi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Kepala Perwakilan,

Rudy M. Harahap

NIP 19690404 198903 1001

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2021  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				KEGIATAN UTAMA	PIC	RISIKO UTAMA	ANGGARAN	SATU AN	TARGET KEGIATAN (TRIWULAN)				
				1	2	3	4						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	Rupiah (Juta)	750	-	-	-	750	Pemeriksaan atas ketaatan pemenuhan kewajiban PNBPN Sektor X pada para wajib bayar	Korwas Bidang IPP	244.706.000	LHP	-	-	8	-
		2	Nilai potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	1.000	-	-	-	1.000					Nilai potensi pajak/PNBPN tidak dapat teridentifikasi (20)			
	3	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	259	-	-	-	259	Evaluasi Optimalisasi PAD Pemda Tahun 2021	Korwas Bidang APD	50.785.000	LHP	-	3	-	-	
		4	Nilai potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	432	-	-	-					432	Nilai potensi pajak daerah/PAD tidak dapat teridentifikasi (20)			
	5	Nilai efisiensi pengeluaran pemerintah daerah	Rupiah (Juta)	185.428	-	-	-	185.428	Evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD pada Pemda	Korwas Bidang APD	13.850.000	LHP	1	-	-	-	
	6	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.351	-	-	-	1.351	Audit Klaim dan Audit Penyesuaian Harga	Korwas Bidang Investigasi	134.462.250	LHP	-	4	-	4	
	7	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	40.679	-	-	-	40.679	Audit Investigatif, Audit PKN, Pemberian Keterangan Ahli	Korwas Bidang Investigasi	280.049.895	LHP	2	1	1	14	

		8	Nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer	Rupiah (Juta)	118	-	-	118	Pengawasan dana transfer	Korwas Bidang APD	Rekomendasi hasil pengawasan dana transfer tidak ditindaklanjuti (14)	50.785.000	LHP	-	3	-	-
		9	Nilai penyelamatan pembiayaan daerah	Rupiah (Juta)	59	-	-	59			Rekomendasi hasil pengawasan pembiayaan daerah tidak ditindaklanjuti (14)						
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional dan Daerah	1	Jumlah Program Prioritas yang tercapai/sesuai target	Program Prioritas	2	-	-	2	Pengawasan Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas (Tata Kelola PSN, vaksinasi COVID-19, Bendungan Tapin, Tanah Objek Reformasi Agraria, sertifikasi lahan, dll)	Korwas Bidang IPP	Rekomendasi hasil pengawasan program prioritas tidak ditindaklanjuti (14)	1.392.786.000	LHP	12	27	20	30
		2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7	-	-	7	Audit Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Korwas Bidang APD	Rekomendasi hasil pengawasan kegiatan prioritas tidak ditindaklanjuti (14)	374.167.5000	LHP	-	4	-	9
		3	Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai/sesuai target	Kegiatan Prioritas	7	-	-	7									
		4	Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target	Program Lintas Sektor	1	-	-	1	Pengawasan Lintas Sektor kegiatan prioritas Bidang Pendidikan		Rekomendasi hasil pengawasan lintas sektor tidak ditindaklanjuti (14)		LHP	-	1	2	1
		5	Persentase desa yang diaudit kinerja dengan hasil baik	Desa	25%	-	-	25%	Audit kinerja pembangunan desa		Rekomendasi hasil audit kinerja pembangunan desa tidak ditindaklanjuti (14)		LHP	-	-	-	4

		6	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Hambatan Pembangunan	80%	-	-	-	80%	Pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan	Korwas Bidang Investasi	Rekomendasi hasil pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan tidak ditindaklanjuti (14)	32.153.000	LHP	-	-	1	1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10	-	-	-	10	Pengawasan terhadap kinerja/kesehatan PDAM, tata kelola BUMD, penerapan MRI pada BUMD, kapabilitas SPI BUMD, penanggulangan COVID 19, dll	Korwas Bidang AN	Rekomendasi hasil pengawasan terhadap kinerja/kesehatan BUMD tidak ditindaklanjuti (14)	792.127.000	LHP	-	20	5	17
		2	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	43,48%	-	-	-	43,48%			Rekomendasi hasil pengawasan terhadap kualitas kesehatan BLUD Rumah Sakit		LHP	-	-	-	7
		3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	-	-	-	2	Pengawasan terhadap tata kelola BUMDes pada Desa		Rekomendasi hasil pengawasan terhadap kualitas kesehatan BLUD rumah sakit tidak ditindaklanjuti (14)		LHP	-	-	-	4
		4	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	6,45%	-	-	-	6,45%			Rekomendasi hasil pengawasan terhadap tata kelola BUMDes tidak ditindaklanjuti (14)		LHP	-	-	-	4
		5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	31	-	-	-	31			Rekomendasi hasil pengawasan represif tidak ditindaklanjuti (14)		LHP	2	1	1	14
2	Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Hasil Pengawasan Preventif/Edukatif	75%	-	-	-	75%	Pengawasan atas efektivitas Pengendalian Korupsi pada K/L/BU (Fraud Control Plan/Fraud Risk Assessment)	Rekomendasi hasil bimbingan teknis FCP/FRA tidak ditindaklanjuti (14)	LHP	-	-	6	11				

5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP Pemda	8	-	-	-	8	- Bimbingan Teknis dan <i>Quality Assurance</i> Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda - Bimbingan Teknis dan Evaluasi Penerapan JFA pada APIP Pemda	Korwas Bidang P3A	- Rekomendasi hasil bimbingan teknis/penjaminan kualitas peningkatan kapabilitas APIP tidak ditindaklanjuti (14) - Rekomendasi hasil evaluasi penerapan JFA pada APIP tidak ditindaklanjuti (14)	458.880.008	LHP	4	3	1	14	
		2	Persentase APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP Pemda	57%	-	-	-	57%										
		3	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Pemda	14	-	-	-	14	Workshop/Diseminasi/Sosialisasi Pembinaan SPIP dan Manajemen Risiko	Korwas Bidang APD	Rekomendasi hasil pengawasan terhadap maturitas SPIP pada Pemda tidak ditindaklanjuti (14)	1.238.826.492	LHP	-	2	-	-	9
		4	Persentase Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Pemda	100%	-	-	-	100%	Evaluasi hasil penilaian Maturitas SPIP dan Manajemen Risiko									
		5	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemkab/Kota	3	-	-	-	3			Rekomendasi hasil pengawasan terhadap maturitas manajemen risiko pada Pemda tidak ditindaklanjuti (17)							
		6	Persentase Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	PemKab/Kota	23,08%	-	-	-	23,08%										
		7	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	1,48%	-	-	-	1,48%	Evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah, Bimtek SAKIP, Bimtek Implementasi SIMDA G-Next dll		Rekomendasi hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tidak ditindaklanjuti (14)		LHP	2	7	1	14	
		8	Tersedianya Rekomendasi Strategis ( <i>Policy Brief</i> ) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1	-	-	-	1	Monitoring inventarisasi aset desa		Data dukung untuk rekomendasi strategis tidak valid (17)		LHP	-	-	8	-	

		9	Persentase desa yang menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Desa	44,99%	-	-	-	44,99%	Kompilasi dan Analisis Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Semester 2 Tahun 2020		Data dukung penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa terlambat (15)		LHP	1	1	2	-
		10	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset secara memadai	Desa	37	-	-	-	37	Evaluasi pengelolaan aset desa pada Kabupaten dan Bimbingan teknis Pengelolaan aset desa		Terdapat aset desa yang dikuasai pihak ketiga (14)		LHP	2	-	-	1
		11	Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	3	-	-	-	3	Bimbingan Teknis Pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siswaskeudes		Rekomendasi hasil bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siswaskeudes tidak ditindaklanjuti (16)		LHP	-	-	-	2
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	76	-	-	-	76	Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi	Kepala Bagian Tata Usaha	Area of Improvement yang diidentifikasi tidak segera ditindaklanjuti (20)	2.506.130.000	Penu gasan	-	-	1	-
		2	Persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pegawai	100%	-	-	-	100%	Layanan SDM		Terdapat pegawai yang tidak diusulkan mengikuti diklat (15)		Penu gasan	1	1	1	1
		3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi SDM	100%	-	-	-	100%			Pengajuan berkas kenaikan pangkat ke Biro SDM tidak lengkap (14)		Penu gasan	-	1	-	1
		4	Persentase Penyusunan RKA tepat waktu	RKA	100%	-	-	-	100%	Layanan Keuangan		Data dukung penyusunan RKA tidak valid (15)		Penu gasan	-	-	-	1

5	Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Skor Skala 100	87	-	-	-	87		Terdapat revisi SPK/Kontrak yang terlambat diajukan ke DJPKN (18)	Penu gasan	1	1	1	1
6	Persentase SPM yang terbit tepat waktu	SPM	91%	-	-	-	91%		Terdapat kekeliruan penulisan angka dalam SPP-GU/LS (16)	Penu gasan	1	1	1	1
7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan Keuangan	100%	-	100%	-	100%		Terdapat kekeliruan pencatatan aset dan kewajiban dalam laporan keuangan (15)	Penu gasan	1	1	1	1
8	Nilai Pengelolaan BMN	Kategori	Baik	-	-	-	Baik	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terdapat BMN yang tidak tercatat dalam aplikasi BMN (15)	Penu gasan	1	1	1	1
9	Nilai Implementasi SAKIP	Skor Skala 100	81	-	-	81	-	Layanan SPIP dan Reformasi Birokrasi	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tidak ditindaklanjuti (17)	Penu gasan	-	-	1	-
10	Level Maturitas SPIP	Level 1-5	3	-	-	3	-		Area of Improvement yang diidentifikasi atas pelaksanaan SPIP tidak ditindaklanjuti (21)	Penu gasan	-	1	-	1
11	Indeks Manajemen Risiko	Level 1-5	3	-	-	3	-		Area of Improvement yang diidentifikasi dalam implementasi manajemen risiko tidak ditindaklanjuti (17)	Penu gasan	1	-	-	1



	1 2	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan	Indeks Skala 100	76	-	-	-	76			Standar layanan ketatausahaan tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya (17)	Survei	-	-	-	1
	1 3	Indeks Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP	Indeks Skala 100	73	-	-	-	73			Kualitas hasil pengawasan tidak memberikan nilai tambah bagi stakeholder (19)	Survei	-	-	-	1